PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)**

UNIT KERJA : **BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSUL MUNAWAR**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **418576**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.605.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.115.000.000
2. Tanah Seluas 466 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 90.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 5.500.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 32.329.889**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.732.829.889**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**32.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.700.829.889**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.